

Politik Luar Negeri Indonesia: Menjaga Keseimbangan antara Demokrasi dan Keharusan Memerangi Terorisme Global

BANTARTO BANDORO

Abstract

The following article discusses the issue of terrorism viewed from the Indonesian foreign policy perspective. The 9/11 tragedy, which highlights terrorism as a new major threat to the international community, has greatly challenged Indonesia in conducting its foreign policy. On one hand, Indonesia's active participation on the U.S.-led "War on Terrorism" is highly demanded. The step needs to be taken by Megawati government as a proof to the international society that Indonesia is never a supporter of terrorists' activities. On the other hand, in executing the foreign policy related to issue of counter-terrorism, the government must act very carefully in order to avoid the pitfalls of negative, domestic sentiments which might endanger the ongoing process of democratization at home and lead to the possibility of becoming a "failed state."

Ketika diresmikan pada Juli 2001, pemerintahan Megawati mewarisi sejumlah persoalan nasional yang sangat kompleks. Upaya untuk memulihkan ekonomi nasional belum memberi arti besar kepada keseluruhan pembangunan ekonomi nasional, sementara guncangan politik pada beberapa provinsi tertentu di Indonesia semakin meningkat. Kunjungan Megawati ke beberapa negara selama 2002 adalah bagian dari upayanya untuk mengamankan kepentingan nasional termasuk memulihkan citra dan posisi Indonesia di luar negeri. Sayangnya, inisiatif internasional Megawati tersebut sejauh itu belum membawa pengaruh berarti pada pemulihan kondisi ekonomi domestik. Akibatnya, publik mengkritik keras kinerja pemerintah.

Kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani masalah ekonomi terjadi

bersamaan dengan ketidaktegasan pemerintah dalam merespon isu terorisme. Tragedi 11 September 2001 ketika itu membuat pemerintah Megawati menjadi fokus perhatian publik. Sikap pemerintah yang dianggap terlalu lamban dalam merespon agresi militer AS ke Afghanistan telah menimbulkan reaksi keras di kalangan publik. Pada akhirnya Megawati dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa aksi terorisme seharusnya tidak ditanggapi dengan aksi teror. Sikap pemerintah yang demikian ini oleh publik masih dianggap kurang keras dan tidak sebanding dengan akibat dari agresi AS ke Afghanistan. Demonstrasi yang menentang AS dan mengkritik kebijakan pemerintah dalam isu terorisme terjadi di mana-mana. Hubungan bilateral Indonesia dengan beberapa negara juga menjadi kurang baik karena perbedaan pandangan mengenai isu terorisme dan cara-cara

menanganinya. Kiranya terlihat jelas bahwa isu terorisme dapat memberikan dampak terhadap diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Tulisan berikut ini membahas persoalan terorisme dalam perspektif politik luar negeri Indonesia.

DEMOKRASI DAN ISU TERORISME

Krisis multidimensi yang dihadapi oleh Indonesia hingga kini masih dianggap terus berlangsung. Berbagai upaya, baik pada level domestik maupun internasional telah dilakukan oleh pemerintah agar Indonesia dapat keluar dari krisis tersebut. Pada tataran domestik, kita menyaksikan sebuah 'drama' yang dimainkan oleh pemerintah untuk mencegah negara menjadi semacam 'negara yang gagal' (*failed state*). Kebijakan yang diambil pemerintah sejauh ini memang berhasil mencegah Indonesia menjadi 'negara yang gagal'. Meskipun demikian sentimen-sentimen untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih ditemukan dan dirasakan di beberapa provinsi yang bergolak.

Semangat reformasi dan demokrasi yang disebarkan oleh gerakan-gerakan proreformasi sejak 1998 memang telah mampu membangunkan kesadaran yang cukup tinggi di kalangan publik akan pentingnya memahami penyelesaian persoalan nasional dalam konteks yang lebih luas dan demokratis. Prakarsa-prakarsa politik pada tataran nasional mulai mendapat pujian publik, setidaknya untuk sementara ini, karena prakarsa-prakarsa tersebut diambil atas dasar prinsip-prinsip demokrasi. Demikian pula, semangat demokrasi sampai tingkat

tertentu membantu pemerintah menjalankan kebijakan luar negerinya secara lebih terfokus. Artinya, suasana yang lebih demokratis menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar kepada pelaksana politik luar negeri untuk menjalankan kebijakan itu secara lebih efektif. Bagaimanapun juga, pencapaian sasaran politik luar negeri sangat ditentukan oleh kondisi-kondisi domestik.

Upaya-upaya menumbuhkan kebiasaan berdemokrasi dalam kehidupan politik nasional telah membuka ruang yang lebih besar kepada seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi dalam proses politik negara. Sebagai sebuah negara yang sedang meniti perjalanan dari sebuah proses demokrasi, Indonesia rawat terhadap segala bentuk gangguan terhadap proses itu, baik itu gerakan separatisme maupun gerakan-gerakan untuk menuntut otonomi yang lebih besar yang diekspresikan melalui cara-cara yang tidak demokratis. Bukan hanya itu, gerakan-gerakan yang dinilai radikal, baik itu karena sentimen agama atau aliran-aliran politik tertentu, juga merebak atas nama demokrasi. Terlihat di sini bahwa proses demokrasi di Indonesia tidak berjalan tanpa masalah. Dalam konteks pertumbuhan demokrasi inilah berbagai macam isu muncul ke permukaan. Salah satunya, terorisme.

Secara umum, terorisme muncul karena kebijakan-kebijakan politik nasional yang memperlakukan secara tidak adil kelompok tertentu. Ketidakadilan ini kemudian diungkapkan dalam bentuk kekerasan, teror, dan bahkan pembunuhan. Dalam tataran internasional, terorisme merebak karena 'pengendali' politik internasional, terutama negara-negara

besar, khususnya Amerika Serikat, menganggap dan memperlakukan kelompok tertentu sebagai sumber ancaman terhadap keamanan internasional, dan karena itu harus diberantas. Merasa terpinggirkan, kelompok-kelompok ini kemudian berjuang dengan cara-cara mereka sendiri untuk mendapatkan keadilan. Serangan terhadap gedung kembar di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 adalah wujud konkret dari tuntutan kelompok tertentu untuk memperoleh tempat yang 'wajar' dalam politik dunia, termasuk hak untuk memperoleh keadilan. Ini membuktikan bahwa politik internasional yang dinilai tidak demokratis telah mendorong bangkitnya tuntutan dari kelompok tertentu untuk mendapatkan perlakuan yang lebih adil.

Menyusul tragedi 11 September 2001 dan serangan AS terhadap Afghanistan yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional, publik dalam negeri Indonesia menuntut pemerintah agar mengambil sikap tegas terhadap agresi AS tersebut. Dalam konteks domestik, isu terorisme telah menjadi semacam komoditas untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Gerakan Islam radikal, misalnya, di masa sebelum terjadinya tragedi 11 September tidak begitu menonjol dalam menjalankan kegiatannya, namun setelah serangan AS ke Afghanistan, menjadi perhatian publik karena kegiatannya dianggap telah mengganggu stabilitas domestik.

Ini membuktikan bahwa upaya membangun kondisi nasional yang lebih demokratis tidak akan bebas dari isu-isu yang dapat mengganggu proses demokrasi

itu sendiri. Gerakan-gerakan politik tertentu yang mengatasnamakan demokrasi, misalnya, seringkali justru dilihat sebagai faktor yang menghambat perkembangan demokrasi karena kegiatan mereka yang mengandung unsur teror. Bisa dimengerti mengapa kemudian pemerintah terpaksa harus mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Bagi gerakan-gerakan itu, kebijakan pemerintah justru dianggap mematikan pertumbuhan demokrasi. Semua ini membuktikan bahwa demokrasi dan terorisme memiliki pertalian yang erat, dan kenyataan inilah yang terlihat di Indonesia. Upaya memerangi terorisme menurut seorang pengamat justru dapat merongrong pertumbuhan demokrasi di Indonesia.¹

Koalisi internasional untuk memerangi terorisme yang dimotori oleh AS telah memasukkan Indonesia sebagai bagian dari perlawanan terhadap terorisme internasional. Indonesia dianggap sebagai komponen kritikal dari upaya memerangi terorisme karena posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduknya yang mayoritas Muslim dan dengan peran politik organisasi-organisasi Islam yang semakin meningkat sejak runtuhnya rezim Soeharto tahun 1998. Menolak tuduhan bahwa Indonesia menjadi tempat subur bagi kegiatan teroris, Indonesia secara politis menjadi bagian dari upaya memerangi terorisme internasional.

Langkah-langkah nasional dalam memerangi terorisme internasional dan sebagai upaya penangkalan kegiatan terorisme di dalam negeri, pemerintah memberlakukan Undang-undang Antiterorisme. Kehadiran undang-undang ini memancing kritik tajam, baik dari

pengamat maupun publik secara umum, karena menggunakan kriteria-kriteria yang kabur dalam mendefinisikan kegiatan terorisme. Terlihat di Indonesia bahwasanya isu ancaman terorisme bukan hanya telah menjadi pembenaran pemerintah untuk melakukan aksi 'sepihak' untuk menekan kelompok-kelompok tertentu yang dicurigai sebagai bagian dari kegiatan terorisme internasional, akan tetapi juga telah menyeret Indonesia ke dalam koalisi internasional memerangi terorisme. Ini merupakan sesuatu—sebagaimana telah disebutkan di atas—yang justru merongrong proses demokrasi di Indonesia.

Meski dikenal sebagai negara yang toleran terhadap perbedaan agama dan mayoritas masyarakatnya mempraktikkan Islam modern, Indonesia mendapati bahwa dalam lingkup domestiknya gerakan-gerakan Islam radikal telah mendapatkan momentum untuk berkembang. Para pejabat AS dan ahli terorisme internasional mengkhawatirkan kemungkinan kelompok Al-Qaeda menggunakan Indonesia sebagai basis kegiatannya di Asia Tenggara.² Indonesia mencoba bertahan dari tekanan-tekanan internasional untuk membasmi kelompok-kelompok militan lokal yang dicurigai memiliki hubungan dengan Al-Qaeda hingga serangan bom di Bali, Oktober 2002. Sejak peristiwa tersebut, upaya serius dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi terorisme.

Sejak insiden Bom Bali Oktober 2002 Indonesia dituding sebagai wilayah bagi kegiatan Al-Qaeda. Para ahli mengatakan bahwa serangan-serangan teroris di Indonesia, termasuk pengeboman gereja

dan pusat perbelanjaan Senen (masing-masing terjadi pada tahun 2000 dan 2001) berkaitan dengan kegiatan terorisme internasional.³ Mengenai tuduhan bahwa Indonesia menjadi tempat bagi kegiatan Al-Qaeda, Menteri Pertahanan Indonesia, Matori Abdul Djilil, mengatakan yakin bahwa kegiatan Al-Qaeda memang eksis di Indonesia. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Indonesia, Hendropriyono juga pernah mengatakan bahwa teroris asing pernah berlatih di Sulawesi, tetapi ia kemudian menarik kembali pernyataannya setelah mendapatkan kritik dari berbagai kelompok Islam domestik.

Sentimen memerangi terorisme internasional yang dimotori AS telah membangkitkan kecurigaan di tingkat domestik Indonesia bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari sasaran AS membasmi terorisme. Kecurigaan demikian didasari atas asumsi bahwa AS memandang gerakan-gerakan Islam militan sebagai bagian dari terorisme internasional, dan karena itu pemerintah Indonesia diminta untuk bekerjasama dengan AS untuk membasmi terorisme. Meskipun tidak secara terang-terangan, Indonesia sesungguhnya terlibat dalam kerjasama internasional untuk memberantas terorisme. Kebijakan pemerintah inilah yang kemudian menimbulkan protes keras dari kelompok Islam radikal bahwa pemerintah Indonesia telah menjadi alat politik negara besar.

Dalam rangka perangnya terhadap terorisme internasional, AS menjanjikan bantuan sebesar 50 juta dolar AS, termasuk untuk pelatihan militer. AS menghentikan kerja sama militer dengan Indonesia pada tahun 1999 setelah militer Indonesia

membumihanguskan Timor Timur. Kalangan pembela hak asasi manusia di Indonesia mengkritik keputusan AS untuk memperbaharui dukungannya terhadap militer Indonesia. Akan tetapi, pejabat pemerintahan Bush mengatakan bahwa sebagian besar bantuan tersebut diberikan untuk angkatan kepolisian, sebuah institusi yang tidak sekuat militer. Memperkuat kerjasama keamanan tidak akan banyak membantu perang terhadap terorisme. Cara terbaik untuk mencegah Indonesia menjadi lahan subur bagi kegiatan Al-Qaeda dan kegiatan anti-AS adalah mendorong demokratisasi dan pembangunan ekonomi.

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA: PROAKTIF, TETAPI HATI-HATI

Sejak tragedi 11 September 2001, Indonesia terlihat mencoba untuk menempatkan dirinya di antara dua kepentingan secara seimbang, yaitu kepentingan untuk bergabung dengan AS dalam memerangi terorisme dan kepentingan dan keharusan untuk menjaga momentum demokrasi tanpa memunculkan kesan menekan kelompok-kelompok militan domestik. Kepentingan yang disebut pertama tidak dapat dihindari ketika Indonesia harus membuktikan bahwa dirinya bukanlah tempat bagi kegiatan terorisme internasional. Keharusan untuk bergabung dalam koalisi internasional antiterorisme bukanlah sikap memihak negara besar dan bukan pula wujud ketergantungan Indonesia kepada AS. Langkah Indonesia bergabung dengan koalisi tersebut harus dilihat dalam konteks pembangunan keamanan dan stabilitas internasional.

Ketika dunia tidak lagi memandang militer sebagai sumber ancaman terhadap keamanan negara dan sistem internasional, ancaman terorisme menjadi begitu dominan dan sulit diduga kemunculannya sehingga dibutuhkan kerjasama internasional yang multilateral untuk menangani isu terorisme ini. Kerja sama multilateral, khususnya untuk memerangi terorisme internasional, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia. Dalam era terorisme ini, politik luar negeri Indonesia justru diuji kehandalannya untuk membantu mewujudkan dunia yang bebas dari ancaman terorisme. Dalam konteks itu, berbagai prakarsa diplomatik telah ditempuh oleh Indonesia bersama negara-negara lainnya di kawasan untuk mendukung perang terhadap terorisme internasional. Deklarasi ASEAN mengenai terorisme yang dikeluarkan pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN ke-7 merupakan komitmen yang mengikat ASEAN dalam aliansi global antiterorisme.⁴

Kesungguhan Indonesia untuk memerangi terorisme tampak pada pertemuan bilateral antara Megawati dengan Presiden Arroyo tahun 2001. Dalam pertemuan itu kedua negara menghendaki semacam perjanjian pluralistik untuk memerangi terorisme yang melibatkan seluruh negara anggota ASEAN. Kemudian, dalam konferensi pers yang diadakan oleh Megawati dan Perdana Menteri Thailand tahun 2002, kedua pemimpin mengatakan bahwa anggota ASEAN perlu membangun langkah-langkah bersama memerangi terorisme di kawasan dan untuk itu pertukaran informasi intelijen sangat diperlukan.⁵

Isu terorisme secara umum telah membuat hubungan di antara pemimpin ASEAN menjadi semakin erat. Isu ini dianggap mendesak karena kawasan Asia Tenggara dikenal sebagai wilayah bagi jaringan terorisme internasional. Persetujuan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme global menjadi dasar yang kuat bagi kerjasama regional dalam mengatasi masalah tersebut.

Dari perspektif strategis, keterlibatan Indonesia dalam koalisi global antiterorisme tidak hanya akan meningkatkan posisi internasional Indonesia, tetapi juga mendorong konstruksi jaringan internasional yang lebih efektif untuk mengatasi dampak dari aksi terorisme. Keterlibatan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dalam perang antiterorisme global mengkonfirmasi bukti bahwa sumber ancaman dan aksi terorisme berasal bukan saja dari dalam perbatasan suatu negara, tetapi juga lintas batas. Dengan demikian, upaya-upaya nasional sendiri dianggap tidak cukup, sehingga diperlukan langkah-langkah global dan regional.

Jika Indonesia ingin dilihat sebagai aktor yang efektif dalam koalisi global antiterorisme, maka ia harus menjalankan strategi yang mengandung komponen berikut: (a) tidak memberi konsesi apapun kepada siapapun yang dianggap sebagai teroris; (b) membawa pelaku teror ke pengadilan; (c) kerjasama bilateral, khususnya pertukaran informasi intelijen. Dalam kerangka strategi demikian, Indonesia harus menggunakan *multiple tools* untuk menjalankan strategi tersebut. Diplomasi internasional adalah instrumen yang cukup penting, terlebih untuk

mencari dukungan terhadap apapun kebijakan yang diambil oleh Indonesia sehubungan dengan keanggotaannya dalam aliansi global antiterorisme.

Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia selama ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya menentang terorisme sebagai cara untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Aksi terorisme bukan saja bertentangan dengan prinsip-prinsip perdamaian internasional, tetapi juga melanggar keamanan manusia dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sejak serangan 11 September, Indonesia melalui diplomasinya berusaha untuk menjadi bagian penting dalam kampanye antiterorisme. Sikap proaktif Indonesia bukan hanya ditunjukkan dengan kesungguhannya untuk mengungkap kasus bom Bali, tetapi juga dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan regional mengenai terorisme. Sikap Indonesia yang proaktif tentu didasari atas perhitungan-perhitungan yang sangat hati-hati agar kebijakan antiterornya tidak menimbulkan kesan menghambat proses demokrasi dan mematikan aspirasi-aspirasi beberapa kelompok tertentu. Keberpihakan Indonesia dengan aliansi global antiteror juga sebaiknya dilakukan secara hati-hati, semata-mata untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional untuk memberantas terorisme.

Sebagai negara yang juga menentang aksi teror, Indonesia tidak mengabaikan kemungkinan aksi militer langsung terhadap kelompok-kelompok terorisme di kawasan, dan jika hal ini terjadi, pemerintah Indonesia harus meyakinkan publiknya bahwa tindakan tersebut

dilakukan secara bersama dengan inisiatif-inisiatif kontraterorisme lokal. Dalam konteks ini, Indonesia juga harus mengambil sikap sangat hati-hati agar dukungannya terhadap aksi militer tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia membenarkan kebijakan campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara.

Jika kebijakan Indonesia mendukung aliansi global antiteror ingin dilihat berhasil, maka Indonesia harus memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung kebijakan tersebut dan meyakinkan masyarakatnya bahwa upaya eradikasi terorisme bukan hanya suatu keharusan, tetapi juga sesuatu yang diinginkan. Artinya, kebijakan dan strategi antiteror Indonesia harus memperoleh dukungan penuh dan tanpa syarat dari publik.

Semangat untuk membasmi terorisme pada tingkat global telah menyadarkan pemerintah Indonesia akan pentingnya menjaga keamanan nasional dari kemungkinan aksi teror oleh pihak luar. Ini berarti isu terorisme menjadi faktor pembentuk kebijakan keamanan Indonesia di kemudian hari. Ditekankan di sini bahwasanya dalam koalisi global antiterorisme, Indonesia dapat menjadi semacam faktor pembentuk bagi strategi kontraterorisme. Sayangnya, karena kelemahan dalam sistem yudisial, pemerintah yang korup dan masalah-masalah domestik lainnya, maka sulit bagi Indonesia untuk mengeliminasi secara total jaringan-jaringan terorisme pada tingkat nasional.

Mengingat terbatasnya sumber daya serta adanya kelemahan dan kesulitan yang inheren dimilikinya, Indonesia seharusnya

membuka diri terhadap apapun dukungan yang diberikan oleh AS untuk meningkatkan kredibilitas strategi antiterornya. Dengan determinasi politik dan dukungan teknis dan politik dari AS, Indonesia diharapkan mampu membasmi jaringan teroris lokal. Kenyataan bahwa Indonesia tidak dapat bergerak sendiri dalam memerangi terorisme berarti bahwa Indonesia membutuhkan bantuan dari negara-negara lainnya untuk berbagi informasi mengenai kegiatan teroris.

Dalam era teror ini, politik luar negeri Indonesia seharusnya tidak semata-mata dilihat dalam kerangka perang terhadap terorisme. Akan tetapi, sebagai bagian penting dari komitmen global memerangi terorisme, usaha Indonesia akan dilihat sebagai sesuatu yang serius jika ia mampu menerjemahkan kemauan politiknya ke dalam aksi-aksi kebijakan yang lebih konkret.

NASIONALISME DAN POLITIK LUAR NEGERI

Sentimen-sentimen nasionalisme di Indonesia muncul bersamaan dengan gerakan-gerakan global menentang terorisme dan tuduhan bahwa Indonesia merupakan wilayah subur bagi kegiatan terorisme. Sentimen demikian tidak hanya diarahkan kepada masyarakat internasional secara keseluruhan, tetapi juga negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Indonesia telah menjadi terlalu sensitif terhadap lingkungan eksternalnya, antara lain karena intrusi IMF selama krisis finansial, keterlibatan PBB dalam masalah Timor Timur dan tuduhan bahwa Indonesia melindungi pelaku aksi teror.

Gelombang demonstrasi anti-AS yang muncul menyusul serangan AS di Afghanistan dan protes keras dari beberapa kelompok terhadap kebijakan nasional Indonesia dalam masalah tersebut menunjukkan sentimen nasionalis yang cukup kuat. Sentimen demikian telah menjadi semacam penggerak untuk membuktikan bahwa Indonesia bukanlah tempat subur bagi kegiatan teroris seperti dituduhkan oleh beberapa negara tertentu. Konsekuensinya, politik luar negeri Indonesia yang dijalankan dalam kerangka perang global terhadap terorisme tidak dapat mengabaikan faktor tersebut. Ketika Presiden Bush menyatakan pesan, "*Either you are with us or with the terrorists,*" pernyataan tersebut menimbulkan perasaan tertekan yang sangat luar biasa bagi Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya. Di sini, faktor sentimen nasionalis begitu besar perannya dalam membentuk sikap Indonesia terhadap masalah terorisme global, meskipun kemudian Indonesia menjadi bagian penting dalam koalisi global antiterorisme.

Perang terhadap terorisme jelas tidak akan memakan jangka waktu pendek. Selama perang terhadap terorisme berlangsung, ia akan terus menjadi semacam faktor yang mempengaruhi kohesi sosial dan politik Indonesia. Isu terorisme tidak akan terhapus begitu saja dari agenda internasional dan nasional, dan kegiatan terorisme juga akan tetap eksis di masa depan. Ini berarti bahwa dunia yang bebas dari teror masih jauh dari yang diharapkan. Atas dasar asumsi demikian, bukan tidak mungkin bahwa di masa depan Indonesia akan tetap menjadi fokus dari perang global terhadap terorisme.

Haruskah sentimen nasionalisme menangkai kemungkinan tersebut?

Dalam situasi dan kondisi di mana Indonesia sedang membangun demokrasi dalam berbagai kehidupannya, sentimen nasionalisme sampai batas tertentu dibutuhkan sebagai semacam perekat dan pemersatu nasional. Akan tetapi, sentimen demikian seharusnya tidak menjadi kendala bagi Indonesia untuk ikut bergabung dalam aksi global memerangi terorisme. Di saat perang global terhadap terorisme semakin meningkat di masa mendatang, politik luar negeri Indonesia perlu dibangun dan dijalankan sedemikian rupa sehingga ia menjadi semacam instrumen untuk meneguhkan komitmen Indonesia terhadap koalisi global antiterorisme. Perlu diingat bahwa politik luar negeri Indonesia tidak harus selalu dilihat dalam konteks perang terhadap terorisme. Adalah sebuah kemunduran jika ruang gerak politik luar negeri Indonesia dibatasi hanya pada kerangka perang global terhadap terorisme.

PENUTUP

Terorisme hanyalah salah satu dari sekian banyak persoalan yang dihadapi Indonesia di saat ia mempraktikkan demokrasi. Proses demokratisasi tidak selamanya menghasilkan kondisi politik yang kondusif, terutama ketika muncul gerakan-gerakan yang mengatasnamakan demokrasi, apalagi jika aspirasi mereka disampaikan melalui cara-cara teror dan tidak demokratis. Ketika dunia memulai perang terhadap terorisme global, menyusul Tragedi 11 September, Indonesia di bawah Megawati menghadapi dilema,

yakni antara memerangi kelompok-kelompok Islam radikal seperti diminta oleh AS misalnya (dan dengan demikian membangkitkan kemarahan partai-partai Islam) atau mengambil sikap ambivalen terhadap persoalan kehadiran kelompok-kelompok teroris internasional di Indonesia. Indonesia kembali menjadi fokus perhatian dunia menyusul Tragedi Bom Bali Oktober 2002. Sejak peristiwa tersebut, dunia semakin yakin bahwa kegiatan teroris internasional memang eksis di Indonesia dan dengan demikian pemerintah semakin sulit menghindari tekanan internasional untuk mengungkap keberadaan dan kegiatan teroris dan bergabung dalam proses multilateral membasmi terorisme global.

Sadar akan semakin rawannya keamanan nasional dari kemungkinan kegiatan-kegiatan teroris yang lintas batas, Indonesia mengambil inisiatif-inisiatif nasional untuk mengatasi aksi teroris dan untuk membuktikan kepada dunia komitmennya terhadap perang melawan terorisme global. Di sini, melalui politik luar negerinya, Indonesia menunjukkan sikap yang amat proaktif, tetapi sangat hati-hati, dalam kerjasama internasionalnya memerangi aksi teroris.

Selama isu terorisme menjadi isu internasional utama, siapapun yang duduk dalam pemerintahan baru pasca-Pemilu 2004 nanti akan tetap sulit menghindari tekanan internasional untuk memerangi terorisme. Terlebih jika Pemilu 2004 nanti justru menghasilkan kondisi keamanan yang tidak stabil dan karena itu memberi ruang kepada kegiatan-kegiatan teroris untuk muncul ke permukaan. Dalam kondisi demikian, tidak ada pilihan lain

bagi pemerintah, kecuali menerapkan apa yang dilihatnya sebagai instrumen nasional pemberantas terorisme secara tidak diskriminatif. Pada tataran internasional, kebijakan Indonesia memerangi terorisme dapat diimplementasikan melalui forum bilateral maupun multilateral secara lebih pro-aktif dan lebih hati-hati. Hal terpenting yang perlu ditekankan adalah bahwasanya kebijakan internasional antiteror Indonesia tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lebih utama, yaitu pemulihan kondisi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

The Jakarta Post, 18 Januari 2002.

Situs Internet

<http://www.fpif.org>

<http://www.terrorismanswer.com>

Dokumen

"2001 ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism"

CATATAN BELAKANG

¹ John Gershman, "Fighting Terrorism, Undermining Democracy in Indonesia," *Foreign Policy in Focus*, September 2001, <http://www.fpif.org/>. Diakses 17 April 2003.

² "Indonesia, Terrorism: Q & A", <http://www.terrorismanswer.com>, diakses 18 April 2003.

³ *Ibid.*

⁴ Lihat "2001 ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism".

⁵ *The Jakarta Post*, 18 Januari 2002.